

ISSN 0853-9200

INFO TEKNIS EBONI

Vol. 15 No.1, Juli 2018



BALAI LITBANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

| | | | | | |
|----------------------|---------|-------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Info Teknis Ebony | Vol. 15 | No. 1 | Hal. 01 - 64 | Makassar Juli 2018 | ISSN 0853-9200 |
|----------------------|---------|-------|-----------------|-----------------------|-------------------|

ISSN : 0853-9200

INFO TEKNIS EBONI

Info Teknis Eboni adalah publikasi ilmiah semi populer dari Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang menerima dan mempublikasikan tulisan hasil penelitian dan tinjauan atau pemikiran ilmiah dari berbagai aspek kehutanan seperti silvikultur, konservasi, sosial ekonomi, pemanfaatan hasil hutan atau makalah kehutanan lainnya yang relevan dengan dengan frekuensi terbit 2 kali setahun

Penanggungjawab :
Kepala Balai Penelitian Kehutanan Makassar

Dewan Redaksi (*Editorial Board*)
Ketua Merangkap Anggota
Nurhaedah, SP, M.Si

Anggota :
Ir. Suhartati, MP.
Ir. Mody Lempang, M.Si.
Achmad Rizal HB, MT
Ir. Merryana Kiding Allo

Sekretariat Redaksi :
Ketua :
Kepala Seksi Data, Informasi dan Kerjasama

Anggota :
Ir. Sahara Nompoo, Masrum, Amrullah, S.E.
Kasmawati, Jumain, S.E. Arman Suarman

Diterbitkan oleh:
Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat :
Jalan Perintis kemerdekaan Km.16 Makassar, 90243,
Sulawesi Selatan, Indonesia
Telepon: 62-411-554049 Fax: 62-411-554058
E-mail: info@balihutmakassar.org; datinfo.bpkmkms@gmail.com
Website: <http://www.balihutmakassar.org>

INFO TEKNIS EBONI

Vol.15 No.1, Juli 2018

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| PEMUNGUTAN GETAH PINUS DENGAN TIGA SISTEM PENYADAPAN Mody Lempang..... | 01 - 16 |
| MENJARING DATA DAN INFORMASI PENELITIAN MELALUI FGD (<i>Focus Group Discussion</i>): BELAJAR DARI PRAKTIK LAPANG Achmad Rizal H. Bisjoe..... | 17 - 27 |
| KEBIJAKAN PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR PENGGUNAAN LAHAN DAN PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN KEHUTANAN (LULUCF) Wahyudi Isnan..... | 29 - 39 |
| KELEMBAGAAN PETANI SUTERA DI KABUPATEN SOPPENG Nurhaedah Muin dan Wahyudi Isnan | 41 - 52 |
| KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PULAU TANAKEKE DALAM MENGELOLA EKOSISTEM MANGROVE Arman Hermawan dan Heru Setiawan | 53 - 64 |

INFO TEKNIS EBONI

Vol. 15 No. 1, Juli 2018

ISSN 0853-9200

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Mody Lempang (Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar)

Pemungutan Getah Pinus dengan Tiga Sistem Penyadapan
Info Teknis Eboni Vol. 15 No. 1, hal. 1 - 16

Keberadaan tanaman pinus (*Pinus merkusii*) di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan mempunyai arti yang penting bagi masyarakat, karena dari tanaman ini selain menghasilkan kayu juga dapat dipungut getahnya. Bagi daerah yang berada pada ketinggian atau pegunungan, hutan pinus tidak hanya memiliki fungsi produksi (kayu dan getah) tetapi juga mempunyai fungsi lindung. Beberapa sistem penyadapan telah diuji coba untuk pemungutan getah pohon baik konvensional maupun yang modern, namun untuk pemungutan getah pinus hanya ada tiga sistem penyadapan yang telah diuji coba atau sedang diterapkan, yaitu sistem koakan, koprak, dan bor. Masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kelemahan sehingga dalam penentuan sistem mana yang akan dipilih dan digunakan, perlu mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan kelestarian. Hasil getah pinus pada tiga sistem penyadapan dapat ditingkatkan dengan menggunakan stimulan H_2SO_4 15%. Penyadapan getah pada kawasan hutan lindung paling sesuai jika menerapkan sistem koprak yang tidak menyebabkan kerusakan batang pohon, sehingga kelestarian hutan pinus dapat dipertahankan. Pada penyadapan yang dilakukan di dalam kawasan hutan produksi atau pada pohon pinus yang akan disadap mati, hasil getah dapat dimaksimalkan dengan menerapkan sistem koprak, bor, dan koakan secara bergantian dalam tiga rotasi penyadapan.

Kata kunci: Sistem penyadapan, getah, pinus

Achmad Rizal H. Bisjoe (Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar)

Menjaring Data dan Informasi Penelitian Melalui FGD (*Focus Group Discussion*): Belajar dari Praktik Lapangan
Info Teknis Eboni Vol. 15 No. 1, hal. 17 - 27

Focus Group Discussion atau disingkat FGD sudah diterjemahkan sebagai Diskusi Kelompok Terarah namun dalam perkembangannya istilah FGD

lebih mudah dipahami praktisi dan peminat, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial. Metode ini pada umumnya digunakan dalam pengumpulan data kualitatif dan dipandang relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan metode lainnya. Sebagai metode, ada beberapa prinsip yang menjadi kekhasan FGD, namun adakalanya tidak dapat dipenuhi, sehingga tidak semua penyelenggaraan pertemuan untuk pengumpulan data dapat disebut FGD. Banyaknya FGD yang sudah diselenggarakan menyebabkan metode ini sarat dengan berbagai penyesuaian yang mungkin bersifat khas setempat. Tulisan ini bermaksud meninjau kembali sepintas tentang FGD berdasarkan tinjauan beberapa pustaka, dan sedikit pengalaman penulis dalam mengikuti penyelenggaraan FGD. Diharapkan melalui tulisan ini, dapat diperoleh penyegaran kembali tentang FGD (Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya) dan refleksi terhadap FGD yang sudah digunakan selama ini dan selanjutnya ada upaya untuk menyelenggarakan FGD sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Kata kunci: Data dan informasi, penelitian, metode FGD

Wahyudi Isnain (Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar)

Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Penggunaan Lahan dan Perubahan Tata Guna Lahan Kehutanan (LULUCF)

Info Teknis Eboni Vol. 15 No. 1, hal. 29 - 39

Komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional sampai tahun 2030 ditindak-lanjuti dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Sektor lahan sebagai sektor yang paling besar menghasilkan emisi perlu diatur dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait emisi GRK dari sektor lahan antara lain kebijakan Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan moratorium izin pembukaan lahan hutan dan gambut. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan-kebijakan tersebut menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyempurnaan dalam kebijakan tersebut, sehingga tata kelola hutan dan gambut menjadi lebih baik yang berakibat pada penurunan emisi GRK. Perpanjangan moratorium pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan negara, pemulihan lahan gambut yang terdegradasi, penerapan program konservasi energi, serta melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap perubahan iklim diharapkan dapat menurunkan emisi GRK.

Kata kunci: Kebijakan, emisi GRK, sektor lahan

Nurhaedah Muin dan Wahyudi Isnani (Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar)

Kelembagaan Petani Sutera di Kabupaten Soppeng

Info Teknis Eboni Vol. 15 No. 1, hal. 41 - 52

Usaha sutera alam di Kabupaten Soppeng melibatkan dua kelembagaan pada tingkat petani yaitu kelembagaan pada aspek budidaya dan kelembagaan pada aspek pengolahan kokon. Kedua lembaga saling bekerja sama dalam mendukung pengelolaan sutera alam. Berbagai program pemerintah dalam peningkatan produk sutera alam yang mensyaratkan akses melalui kelompok, mendorong perlunya dibentuk kelembagaan pada tingkat petani, dalam hal ini kelompok tani. Meskipun, dalam perjalanannya kebanyakan kelompok tani yang terbentuk memiliki peran yang terbatas, dalam mengakses program dari pemerintah dan pihak terkait. Namun, pada dasarnya kelompok tani dapat memperluas peran dalam mendukung peningkatan produksi kokon dalam pengembangan usaha sutera alam, tetapi kelompok tani perlu memiliki komitmen bersama antar anggota dan pengurus. Untuk itu, kelompok tani yang sudah terbentuk baik pada aspek budidaya maupun pengolahan kokon perlu dibina dan diberdayakan, agar kelompok yang ada dapat berfungsi optimal dalam mendukung upaya peningkatan produksi kokon.

Kata Kunci: Kelompok tani, kelembagaan, sutera alam, produksi, kokon

Arman Hermawan dan Heru Setiawan (Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar)

Kearifan Lokal Masyarakat Pulau Tanakeke dalam Mengelola Ekosistem Mangrove

Info Teknis Eboni Vol. 15 No. 1, hal. 53 - 64

Kawasan hutan mangrove di Pulau Tanakeke merupakan kawasan mangrove yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasan 951,11 ha. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dan pengalaman buruk akibat degradasi mangrove di masa lampau, membuat masyarakat termotivasi untuk mengelola mangrove dengan kearifan tradisional. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kearifan lokal masyarakat Pulau Tanakeke dalam mengelola ekosistem mangrove. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 899,56 ha hutan mangrove di Pulau Tanakeke dikelola secara individu dan telah dianggap sebagai aset ekonomi keluarga. Dari keseluruhan mangrove yang ada di Pulau Tanakeke,

terdapat satu kawasan hutan mangrove yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh masyarakat, yaitu "Bangko Tappampang". Terbentuknya kawasan konservasi Bangko Tappampang ini berawal dari dibentuknya Forum Pemerintah Desa di Pulau Tanakeke. Forum Pemerintah Desa bersama masyarakat telah menyusun rencana pengelolaan kawasan Bangko Tappampang. Harapan masyarakat ke depan, kawasan Konservasi Mangrove Bangko Tappampang dapat dijadikan sebagai objek ekowisata dan kawasan pendidikan serta penelitian yang dapat menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: Kearifan lokal, Hutan Mangrove, Bangko Tappampang, Pulau Tanakeke